

## MODEL EVALUASI PRODUK HUKUM DAERAH BERBASIS HUKUM TATA NEGARA DAN MAQASHID SYARIAH DALAM MEWUJUDKAN REGULASI YANG KONSTITUSIONAL DAN BERKEMASLAHATAN

Akhmad Zaki Yamani  
IAI Darul Ulum Kandungan  
[zaki@iaidukandangan.ac.id](mailto:zaki@iaidukandangan.ac.id)

### ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kompleksitas pembentukan produk hukum daerah dalam era desentralisasi yang menuntut regulasi tidak hanya memenuhi aspek legalitas formal, tetapi juga mampu mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Permasalahan utama yang dihadapi adalah masih banyaknya peraturan daerah yang mengalami disharmonisasi dengan peraturan yang lebih tinggi, berpotensi bertentangan dengan prinsip konstitusionalitas, serta belum sepenuhnya mencerminkan nilai kemanfaatan substantif bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan merumuskan model evaluasi produk hukum daerah berbasis Hukum Tata Negara dan Maqashid Syariah untuk menghasilkan regulasi yang konstitusional dan berkemaslahatan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, filosofis, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model evaluasi yang selama ini digunakan cenderung berorientasi pada aspek legal-formal sehingga belum mampu mengukur dimensi kemaslahatan secara komprehensif. Penelitian ini menawarkan Model Evaluasi Konstitusional-Maqashidi yang mengintegrasikan pengujian konstitusionalitas, legalitas, dan kemaslahatan dalam satu kerangka evaluasi. Secara teoretis, model ini memperkaya kajian evaluasi regulasi, sedangkan secara praktis dapat menjadi instrumen bagi pemerintah daerah dalam menghasilkan regulasi yang lebih berkualitas.

**Kata Kunci:** Hukum Tata Negara; Kemaslahatan; Konstitusionalitas; Maqashid Syariah.

### ABSTRACT

*This study is motivated by the growing complexity of regional legal products within the decentralization framework, which requires regulations to fulfill not only formal legality but also substantive public welfare objectives. The primary issue lies in the persistence of regional regulations that are inconsistent with higher-level legislation, potentially conflict with constitutional principles, and inadequately reflect societal benefits. This research aims to formulate an evaluation model for regional legal products based on Constitutional Law and Maqashid Sharia to promote regulations that are both constitutional and welfare-oriented. The study employs normative legal research using statutory, conceptual, philosophical, and comparative approaches. The findings reveal that existing evaluation mechanisms predominantly emphasize formal legal compliance and have not comprehensively assessed substantive public benefit. This research proposes a Constitutional-Maqashidi Evaluation Model integrating constitutionality, legality, and public welfare into a unified analytical framework. Theoretically, the model contributes to the development of regulatory evaluation studies. Practically, it offers policymakers and regional governments a systematic instrument for producing higher-quality, constitutionally compliant, and socially beneficial regulations.*

**Keywords:** *Constitutionality; Constitutional Law; Maqashid Sharia; Public Welfare*

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Penerapan otonomi daerah di Indonesia merupakan konsekuensi logis dari sistem desentralisasi yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wilayahnya. Dalam kerangka tersebut, pembentukan produk hukum daerah menjadi instrumen strategis untuk menerjemahkan kebijakan nasional ke dalam lokal sekaligus menjawab berbagai kebutuhan